

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahruz dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Adami, Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*: Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan, 2010, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo
- Dwidja Priyatno. 2010. *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Yogyakarta : Kencana.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum- Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Farid, Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Habullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporas ipada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Hardum, S Edi. 2016. *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*. Yogyakarta : ArRuzz Media.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta : Sinar Grafika.

Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.

H.Setiyono. 2003. *Kejahatan Korporasi :Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Malan : :Banyumedia Publishing

IOM dan NZAID, 2005, *Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum* .Kelompok Kerja Convention Watch, 2004. *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

\_\_\_\_\_. 2010. *Labour Migration From Indonesia L An Overview of Indonesian Migration to Selecial Destinations of Asia dan Middle East Article*.

Lexy J. Moelong. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya..

Moeljatno.1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Arief, 1998.*Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni

Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* .Jakarta : Kencana,.

Prakoso, Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Semarang : Bina Aksara.

Reksodiputro, Mardjono. 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta :Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Rusianto, Agus. 2016 *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada media Group.

- Sapardjaja, Komariah E. 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia : Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Bandung : Alumni,
- Soedarto. 1983. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru
- Soekamto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia
- Suartha, Dewa Made. 2015. *Hukum Pidana Korporasi*. Malang : Setara Press
- Tanuwijaya, Sunardi Fanny. 2002, *Pidana Perampasan Kemerdekaan Bagi Korporasi*, Malang : Universitas Negeri Malang.
- Tim AbhijitDasgupta et al., 2006. *Ketika Mereka di Jual : perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia*, Jakarta : ICMC Indonesia
- Yuwono, Ismatoro Dwi. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish.

## **B. PeraturanPerundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang *Pengesahan Internasional Convention On The Protection Of The Right of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent Suppress and Punish Trafficking in Person Especially Wman and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisir);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Aganst Trafficking In Person Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perorangan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke LuarNegeri

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahunper 26 Juni 2018 Buku I Tindak Pidana Khusus oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

### C. Penelitian

Agus Baha'udin. 2016. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri." *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Babtista Varani Akw, 2017, "Problematisasi dalam Upaya Perlindungan Korban Perdagangan Orang di Indonesia (studi kasus terhadap perdagangan nelayan dan/atau anak buah kapal asing yang bekerja pada PT Pusaka Benjina Resource di Pulau Benjina, Maluku," *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Haryogi Permana. 2016, "Peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) melalui *Cyberspace*", *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Vina Hardyana Infantri. 2014. "Pelaksanaan Program Reintegrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)/ *Trafficking* di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo." *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yunita Sinta Dewi. 2015. "Penerapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap tindakan pelacuran", *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### D. Artikel Jurnal

Hidayati, Maslihati Nur, 2012, *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia - Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Vol. 1 No 3*. Yogyakarta, Maret 2012.

Munthe, Riswan. 2015. *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia - Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 7*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Indonesia, Desember 2015.

Padil. 2016. *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal IUS Vol IV No 1. Mataram, April 2016

## E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Smg atas nama terdakwa Yuliana Jati, tanggal 15 Oktober 2015

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 298/Pid.Sus/2015/PT.SMG atas nama terdakwa Yuliana Jati, tanggal 5 Januari 2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 632K/PID.SUS/2016 atas nama terdakwa Yuliana Jati, tanggal 9 Juni 2015

## F. Sumber Internet

Antara News. 2013. “TKI Formal lebih banyak dari pada informal.”, <https://www.antaranews.com/berita/352291/tki-formal-lebih-banyak-daripada-informal>, diakses 8 Oktober 2017

Deutsche Welle. 2016. “Satu dari Enam PRT di Hongkong Korban Kerja Paksa.”, <http://www.dw.com/id/satu-dari-enam-prt-di-hongkong-korban-kerja-paksa/a-19117309>, diakses 3 Oktober 2017

Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. “Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia”, <http://www.lfip.org/laws822/docs/Perdagangan%20manusiaSentraHAMfeb28.pdf>, diakses 5 Oktober 2017 pukul 11.00 WIB

Hendra Pasuhuk. 2015. “Majikan Penyiksa TKI Erwiana di Hongkong Divonis Bersalah.”, <http://www.dw.com/id/majikan-penyiksa-tki-erwiana-di-hongkong-divonis-bersalah/a-18249421> diakses 2 Oktober 2017

Hukum Online. 2009, “Indonesia Ratifikasi Protokol Pencegahan Human Trafficking”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21103/indonesia-ratifikasi-protokol-pencegahan-ihuman-traffickingi-> diakses 12 Desember 2017

INTERPOL “Trafficking in Human Beings,” <https://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/Trafficking-in-human-beings> kategori Crime Areas Trafficking in Human Being, diakses 12 Desember 2017

Migrant Care. 2017. “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.”, <http://migrantcare.net/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/> diakses 20 Desember 2017.

Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI. 2017. diakses [http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_110\\_2017\\_102658\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2017\\_\(s.d\\_Oktober\\_\)\\_1.pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_110_2017_102658_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_(s.d_Oktober_)_1.pdf) diakses 25 Oktober 2017

Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI 2011, <http://www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI> diakses 30 oktober 2017

Rini Utami. 2017. “KJRI Hongkong berlakukan kontrak mandiri bagi buruh migran”, <https://www.antaranews.com/berita/604925/kjri-hong-kong-berlakukan-kontrak-mandiri-bagi-buruh-migran> diakses 1 November 2017

.Suara BMI, 2017, “Mengapa TKI disebut Pahlawan Devisa?”, <http://www.suarabmi.com/2017/02/mengapa-tki-disebut-pahlawan-devisa.html> diakses 7 Oktober 2017

Suara Merdeka. 2017. Kemnko PMK telah persiapan 29 RAN TPPO Begini Perkembangannya, <https://suararakyatmerdeka.com/2017/12/10/kemenko-pmk-telah-disiapkan-29-rencana-aksi-nasional-pemberantasan-tpo-begini-perkembangannya> diakses 20 Desember 2017